

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai Negara berkembang Indonesia sedang sangat gencar melakukan pembangunan dari semua aspek, seperti kesehatan, pendidikan, infrastuktur, birokrasi dan sebagainya. Seperti pada tertuang dalam UU No 17 tahun 2007 bagian lampiran berbunyi kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastuktur yang maju; (e) melakukan reformasi di bidang hukum aparatur Negara.

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kebutuhan yang harus segera dilaksanakan apalagi dengan diberlakukannya pasar bebas Asean pada awal tahun 2016 maka Indonesia semakin dituntut untuk meningkatkan pembangunan dari berbagai bidang salah satunya adalah birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi yang baik dan tidak rumit membutuhkan waktu yang tidak singkat oleh karena itu

BAB 1 PENDAHULUAN

diperlukan peran semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam Mardiasmo (2009) memberikan definisi yang dikeluarkan oleh *World Bank* mengenai *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran serta pencintaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pemerintah daerah juga dituntut untuk memberikan laporan keuangan daerah dalam periode tertentu untuk mempertanggung jawabkan pekerjaannya. Beberapa laporan yang harus dilaporkan antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D.

Sebagai Negara demokrasi Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah dengan cara pemungutan suara atau biasa disebut pemilihan umum (Pemilu). Seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 12 tahun 2015 pasal 1 menyatakan warga negara dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan memenuhi berbagai macam syarat di dalamnya. Namun tidak dijelaskan latar belakang dari calon kepala daerah tersebut ini berarti setiap orang dengan berbagai macam latar belakang dapat menjadi calon kepala daerah baik pengusaha, *accounting*, guru, bahkan polisi, TNI, PNS, Pegawai BUMN namun pekerjaan

BAB 1 PENDAHULUAN

yang berhubungan pemerintahan dapat mengajukan pencalonan dengan syarat mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaan tersebut.

Menjadi Kepala Daerah menjadi cita-cita dari banyak kalangan masyarakat yang bercita-cita menjadi pemimpin di Daerahnya. Baik ingin menjadikan kotanya lebih baik atau juga hanya sekedar ikut *trend*. Banyak dari kalangan dunia hiburan juga ikut menjajal mencalonkan Kepala Daerah tapi tidak semua dari mereka berhasil menduduki posisi Kepala Daerah banyak juga yang gagal ini membuktikan kepopuleritasan saja tidak cukup untuk mencuri hati masyarakat. Masyarakat Indonesia sudah mulai terbuka dengan informasi, sehingga mudah bagi masyarakat untuk mengetahui latarbelakang, jejak prestasi yang sudah diperoleh, visi misi dan sebagainya bisa masyarakat ketahui, sehingga ini membuat tidak hanya dari kalangan birokrat saja yang bisa mencalonkan diri, banyak dari pengusaha juga ikut meramaikan pesta demokrasi di berbagai daerah.

Dari berbagai macam kalangan yang sudah menjadi Kepala Daerah dari yang berlatar belakang PNS, Pengusaha, Guru, bahkan TNI dan Polri menjadikan hasil kinerja yang berbeda-beda. Sering kita mendengar mengenai “politik dinasti” ini berarti kekuasaan yang berada di suatu daerah dalam beberapa periode ditempati oleh kerabat dari Kepala Daerah sebelumnya. Beberapa daerah masih mengalami hal ini namun dengan adanya dari banyak kalangan yang ikut menjadi bagian dari pemilu mengurangi adanya kemungkinan tersebut. Selain itu dengan ikutnya pengusaha di dalam pesta demokrasi tersebut di harapkan menawarkan visi misi yang akan menjadikan daerah tersebut lebih baik dari sisi ekonomi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mahmudi (2010) untuk mengetahui perbedaan kinerja pemerintah daerah ditinjau dari latar belakang kepala daerah pengusaha dan non-pengusaha. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Mahmudi adalah meneliti D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sedangkan penelitian ini menggunakan Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Peneliti menggunakan kedua provinsi tersebut berdasarkan nilai EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah) yang diperoleh kedua provinsi tersebut memperoleh status “tinggi” dan dari kedua provinsi tersebut cukup lengkap. Perbedaan yang kedua adalah dalam penelitian Mahmudi dilakukan pada tahun anggaran 2005, 2006, 2007, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah tahun 2011, 2012, 2013.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengajukan beberapa variabel yang akan diangkat yaitu latar belakang kepala daerah pengusaha dan non-pengusaha sebagai variabel depeden, kinerja pemerintah sebagai sebagai variable indepeden.

Bedasarkan uraian di atas, untuk peneliti memeberi judul penelitian ini :

“Analisis Kinerja Kepala Pemerintah Daerah Ditinjau dari Latar Belakang Pengusaha dan Non-Pengusaha (Studi Pada Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah)”

1.2 Rumusan Masalah

Walikota atau Bupati sebagai kepala pemerintahan akan sangat berpengaruh pada daerah yang dipimpinnya. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskannya dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Kepala Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto), tingkat kemiskinan, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja Kepala Daerah dengan latar belakang pengusaha dan latar belakang non-pengusaha ditinjau dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto), tingkat kemiskinan, IPM (Indeks Pembangunan Manusia)?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti membuat tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai :

1. Kinerja Kepala Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kepala Daerah berlatarbelakang pengusaha lebih baik dibandingkan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, IPM.

1.4 Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui kinerja Kepala Pemerintah Daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha dan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, dan IPM, sehingga peneliti dapat belajar perbedaan dari keduanya ini memberikan motivasi baru peneliti untuk ikut memajukan daerah agar tidak ada lagi kemiskinan kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

2. Bagi akademisi

Dengan mengetahui perbedaan kinerja dari Kepala Daerah dengan latar belakang pengusaha dan non-pengusaha dapat memotivasi akademisi untuk mau berperan dalam pemerintahan memberikan yang terbaik didalamnya agar kedepannya baik pengusaha maupun non-pengusaha memiliki kinerja yang sama baiknya.